

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang memiliki banyak perbatasan wilayah khususnya batas maritim seringkali menimbulkan sengketa. Salah satu wilayah sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang masih berlangsung hingga saat ini adalah sengketa klaim atas Blok Laut Ambalat. Blok Laut Ambalat sendiri sebenarnya merupakan bagian wilayah dari Indonesia, tepatnya berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Namun, karena wilayah Indonesia dan Malaysia memang sangat berhimpitan, maka terjadi *overlapping claim* antara kedua negara mengenai Blok Laut Ambalat tersebut.

Delimitasi batas maritim yang memakan waktu panjang untuk menyelesaikan sengketa Blok Laut Ambalat sudah terlalu lama berlalu dan masih belum menunjukkan kejelasan sedangkan di sisi lain Blok Ambalat sebagai wilayah yang sangat kaya akan cadangan hidrokarbon lepas pantai dapat di manfaatkan oleh Indonesia dan Malaysia. Kehadiran JDA untuk Blok Laut Ambalat sebagai solusi alternatif yang di rumuskan di dalam Pasal 74 (3) dan 83 (3) UNCLOS 1982 akan memberikan berbagai dampak baik untuk masing-masing negara, mulai dari yang paling utama yaitu menjaga keamanan pasokan minyak dan gas bumi untuk beberapa tahun kedepan yang sangat mungkin terjadi kelangkaan bila tidak segera di lakukan eksploitasi dan eksplorasi cadangan hidrokarbon baru. Beberapa keuntungan lain dari JDA juga dapat mengurangi ketergantungan impor energi akibat meningkatnya produksi minyak dan gas bumi, sebagai kolaborasi teknologi dalam pengembangan produksi hidrokarbon lepas pantai, sampai memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini kurang baik.

Beberapa tujuan dan manfaat dari JDA untuk Blok Ambalat juga akan terjadi bila di dukung oleh elemen pengaturan JDA yang baik. Walaupun pada praktiknya tidak ada satupun norma tertulis yang menjadi acuan dalam membentuk elemen pengaturan JDA tetapi harus dibentuk rangkaian peraturan yang adil dan konkret bagi Indonesia dan Malaysia. Ketika nanti dilakukan proses negoisasi dan perumusan elemen pengaturan JDA, kedua negara harus betul-betul terlibat agar mengetahui betul bagaimana JDA untuk Blok Ambalat akan berjalan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia dan Malaysia.

1.2 Saran

Dengan adanya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Blok Laut Ambalat, saya sebagai penulis skripsi ini memberikan saran untuk dilakukannya JDA di Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia sebagai pengaturan sementara untuk menyelesaikan sengketa di blok laut tersebut agar kedua negara sama-sama dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara bersamaan dan mendapatkan keuntungan secara bersamaan juga, mengingat Blok Laut Ambalat pun memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jika solusi alternatif JDA di Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dibentuk maka masing-masing negara terutama negara kita, Indonesia melalui pemerintah pusat yang memiliki wewenang pada saat itu harus terlibat dan mengetahui dengan jelas berbagai pengaturan JDA yang di negoisasikan dengan pihak Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Havas Oegroseno, *Indonesia's Maritime Boundaries*, di dalam buku Robert Cribb dan Michele Ford, *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2009).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Basuki, Sulistyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006).
- Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), Edisi Revisi.
- Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, (Bandung: Abardin, 1991).
- I Made Andi Arsana, "Batas Maritim Antarnegara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014).
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Harjo Susmoro Haris, Djoko Nugroho, Yanuar Handwiono, "*Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI – Negara Tetangga (Peran Pushidrosal dalam Mendukung Diplomasi Maritim Indonesia)*", (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2019).
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).
- Mochtar Kusumaatmadja, ("*Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor, Hukum dan Pembangunan*"), Juni 1992.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua* (Jakarta: Rajagrafindo, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008).
- Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di era Otonomi Daerah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Syamsumar Dam, *Politik Kelautan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Jurnal

- Ali Maksum, *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*, *Jurnal Sospol*, Vol. 3 No.1 (Januari-Juni 2017).
- Dewi Dwi Puspita Sari S, Etty Eidman, Luky Adrianto, *Studi Analisis Konflik Ambalat Perairan Sulawesi*, *Buletin Ekonomi Perikanan*, Vol. VIII No. 2, 2008.

- Djarot Dimas Achmad Andaru, "Joint Development Agreement Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna", *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 49 No 4, Oktober 2020.
- Tri Patmasari, Eko Artanto dan Astrit Rimayanti, *Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016: 03-21.
- Ferdi, *Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia – Malaysia Pada Blok Ambalat Ditinjau dari Hukum Internasional*, *Jurnal Ilmiah Tambua Edisi Khusus*, April 2010.
- I Made Andi Arsana, *Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1, 2010.
- Ida Kurnia, "Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 2, Juni 2014.
- Ida Kurnia, *Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2 No. 2, Februari 2009.
- John G. Butcher, *The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 35 No. 2, 2013.
- Masahiro Miyoshi, "The Joint Development of Offshore Oil and Gas in Relation to Maritime Boundary Delimitation", *International Boundaries Research Unit*, Vol. 2, No. 5, University of Durham, 1999.
- Merilin L. I. Thomas, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia)*, *Lex et Societatis*, Vol. I No. 2, April-Juni 2013.
- Yudha, AR Wisnu, "Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Inonesia-Singapura", (*Jurnal Oftamologi Indonesia*, 2007).

Media Elektronik

- Alfitra Salamm, "Bertaruh di Ambalat", diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/kolom/107032/bertaruh-di-ambalat&user=register?hidden=login> pada 18 April 2020 pukul 12.10 WIB.
- Anggi Kusumadewi, Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-,panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat> pada 8 Januari 2020 pukul 23.00 WIB.

Anisatul Umah, Gawat! Cadangan Minyak RI Cuma Cukup untuk 9 Tahun!,Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201021113907-4-195969/gawat-cadangan-minyak-ri-cuma-cukup-untuk-9-tahun> pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 20.18 WIB.

Anisatul Umah, Impor BBM Separuh dari Konsumsi, RI Harus Bangun Kilang Baru!,Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201214100723-4-208832/impor-bbm-separuh-dar-konsumsi-ri-harus-bangun-kilang-baru> pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 08.20 WIB.

Anisatul Umah, Simak, Sederet Jurusan Menteri ESDM Tekan Impor Minyak-LPG Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210108124314-4-214467/simak-sederet-jurus-menteri-esdm-tekan-impor-minyak-lpg> pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 23.00 WIB

Defisit Neraca Minyak Indonesia Kian Melebar Produksi dan Konsumsi Minyak Indonesia (2000-2018),Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/04/defisit-neraca-minyak-indonesia-kian-melebar> pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 21.00 WIB.

HESS, Joint Development Area (JDA) Successful Corporation Model, [diakses dari <https://usea.org/sites/default/files/event-/2.2%20Hess%20Joint%20Development%20Area%20Successful%20Corporation%20Model-EN.pdf> pada 26 November 2020 pukul 11.25 WIB].

I Made Andi Arsana, “Titik Pangkal, Garis Pangkal, dan Zona Maritim”, diakses dari <https://slideplayer.info/slide/12695981/> pada 15 Desember 2020 pukul 22.28 WIB

Jittima Mantajit,PhD, Joint Development in the Gulf of Thailand: Malaysia-Thailand Joint Development Area, Diakses <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2011/06/Session-5-JM-June11-pdf.pdf> pada 11 Januari 2021 pukul 20.00 WIB

Map of Joint Petroleum Development Area within the Timor Sea diakses dari <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-07-22/map-of-joint-petroleum-development-area-within-the-timor-sea.jpg/11331920> pada 25 November 2020 pukul 22. 37 WIB.

Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/case/132> pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.16 WIB.

Mengurai Persoalan Hukum Pengelolaan Tambang Bawah Laut, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfd03d13ceb3/mengurai-persoalan-hukum-pengelolaan-tambang-bawah-laut/> pada 10 Januari 2020 pukul 17.10 WIB.

Ruri Suci Muliasari, “Studi Kasus Hukum Internasional (Delimitasi Maritim di Laut Hitam”, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/289084886/STUDI-KASUS-HUKUM-INTERNASIONAL-DELIMITASI-MARITIM-DI-LAUT-HITAM> pada tanggal 7 November 2020 pukul 19.57 WIB.

Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama, Diakses dari <https://pshk.or.id/blog-id/sengketa-batas-maritim-dan-zona-pembangunan-bersama/> pada 26 November 2020 pukul 11.08 WIB.

Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama, Diakses dari <https://pshk.or.id/blog-id/sengketa-batas-maritim-dan-zona-pembangunan-bersama/> pada 27 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.

Website Malaysia-Thailand Joint Authority, diakses dari https://mtja.org/about_jda.php pada tanggal 16 September 2020 pukul 08.15 WIB

Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) celebrates 40 years of success of the Malaysia-Thailand Joint Development Area (MTJDA). Diakses dari https://www.spe.org/binaries/content/assets/spe-events/2019/summit/20wm15/press-release-40-anniversary-mtja-_final-eng-v2.docx pada 3 Februari pukul 19.10 WIB.

Malaysia-Thailand celebrate 40 years of success in joint petroleum development. Diakses dari <https://www.nationthailand.com/business/30376506> pada 3 Februari pukul 19.00 WIB.

Artikel/skripsi

I Made Andi Arsana, “*Merajut Dinding Maya: Delimitasi Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia*”, (Seminar Nasional “Diplomasi Perbatasan: Strategi Indonesia Mengalahkan Klaim Malaysia dalam Perundingan, 2010).

Suharto, Tesis, “*Pengembangan Alliances Strategic Supply Chain Management Pengadaan Kapal Angkatan Laut Republik Indonesia*” (Depok: Universitas Indonesia, 2009).

Melkiades Laot, “The Implementation of the Joint Development of Greater Sunrise Special Regime Under the 2018 Timor Sea Maritime Boundaries Treaty Between Timor Leste and Australia”, World Maritime University Dissertations, 2019.

Sugiarto Tanudjaja, *BAB III Akibat Hukum Suksesi Negara Timor Leste Terhadap Negara Indonesia* Diakses dari <https://docplayer.info/47082618-Bab-iii-akibat-hukum-suksesi-negara-timor-leste-terhadap-negara-indonesia-a-yurisdiksi-kedaulatan-negara-terhadap-suatu-wilayah.html>

Clive Schofield, “*Defining Areas for Joint Development in Disputed Waters*” Faculty of Law, Humanities and the Arts University of Wollongong, Australia, 6-7 Desember 2012

Adrianus Adityo Vito Ramon, “*Coastal States Jurisdiction in Joint Development Areas*” (Australia: T.C. Beirne School of Law the University of Queensland).

Aquiles Sarmiento Varela, Tesis, “*Masalah Hukum Di Celah Timor Antara Timor-Leste Dengan Australia – Telaah Dari Aspek Perlindungan Kepentingan Hukum,*” (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2013).

J. Tanga Biang, *The Joint Development Zone Between Nigeria and Sao Tome and Principe: A Case of Provisional Arrangement in the Gulf of Guinea International Law, State Practice and Prospects for Regional Integration*, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, (New York: United Nations, 2010).

Ety Syamsiyah, Tesis "Ariyati, Analisis Ketentuan-Ketentuan Di Production Sharing Contract Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Minyak Dan Gas Bumi", (Depok: Universitas Indonesia, 2010)

Tri Patmasari dan Sobar Sutisna, "*Delimitasi Batas Maritim Dalam Sengketa Ambalat*", (Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL

